



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Januari 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi





Ikhtisar Eksekutif

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai pertanggung-jawaban kinerja Dinas selama tahun 2024, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang dihasilkan Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut : Dari indikator kinerja utama SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian pada IKU telah mendekati target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKU sebagai berikut :

- a. Untuk sasaran Meningkatnya produksi perikanan, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) Jumlah produksi perikanan budidaya (ton). Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk indikator 1) Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2023 adalah sebesar 82% dan untuk indikator 2) Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2023 adalah sebesar 81,46%
- b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00%; 2) Kawasan konservasi yang

dikelola secara berkelanjutan (ha) capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00%; 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 100,0%.

- c. Sasaran meningkatnya Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan, dengan indikatornya Jumlah rumah tangga perikanan (RTP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 109,7%.
- d. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 98,29%.
- e. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikatornya Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 77,2%

Selanjutnya untuk mencapai sasaran strategik tersebut diimplementasikan melalui 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan termasuk rutin. Pada awal penyusunan Anggaran biaya untuk mengimplementasikan 6 program tersebut sebesar Rp 37.713.505.576,- dan pada APBD perubahan menjadi Rp 39.078.706.742,- atau naik sebesar 3,6% yang terdiri dari dana APBD Murni baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama tahun 2024 telah memenuhi seluruh sasaran strategik dari 5 sasaran strategik yang ditargetkan. Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu: 1) Meningkatkan produksi perikanan; 2) Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan; 3) Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan; 4) Meningkatkan angka konsumsi ikan, dan; 5) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil

analisis atas capaian kinerja tahun 2024 dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi terutama dengan dinas yang membidangi perikanan ditingkat Kabupaten/Kota dalam upaya penyelarasan program kegiatan guna tercapainya sasaran kelautan dan perikanan yang sudah ditetapkan .
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
3. Menciptakan inovasi di bidang kelautan dan perikanan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi terutama permasalahan pakan ikan serta dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika Laporan	10
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	21
3.3 Realisasi Anggaran	39
IV. PENUTUP	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022-2026	12
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	18
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	19
Tabel 3.3	Capaian realisasi kinerja meningkatnya produksi perikanan	20
Tabel 3.4.	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2024 serta Tahun 2022 dan Tahun 2023	21
Tabel 3.5	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	22
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2024	25
Tabel 3.7	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah	27
Tabel 3.8	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2024	30
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah	30
Tabel 3.10	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2024	31
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2024 serta Tahun 2022 dan Tahun 2023	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah	33
Tabel 3.13	Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024	34
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 serta Tahun 2022 dan Tahun 2023	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka	35

Tabel 3.16	Menengah Daerah Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	37
Tabel 3.17	Analisis efisiensi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	38

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	2
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	7
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	7
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024	7
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	8
Gambar 3.1	Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya	21
Gambar 3.2	Perbandingan realisasi persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	26
Gambar 3.3	Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan	32
Gambar 3.5	Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2022-2023	35

I PENDAHULUAN

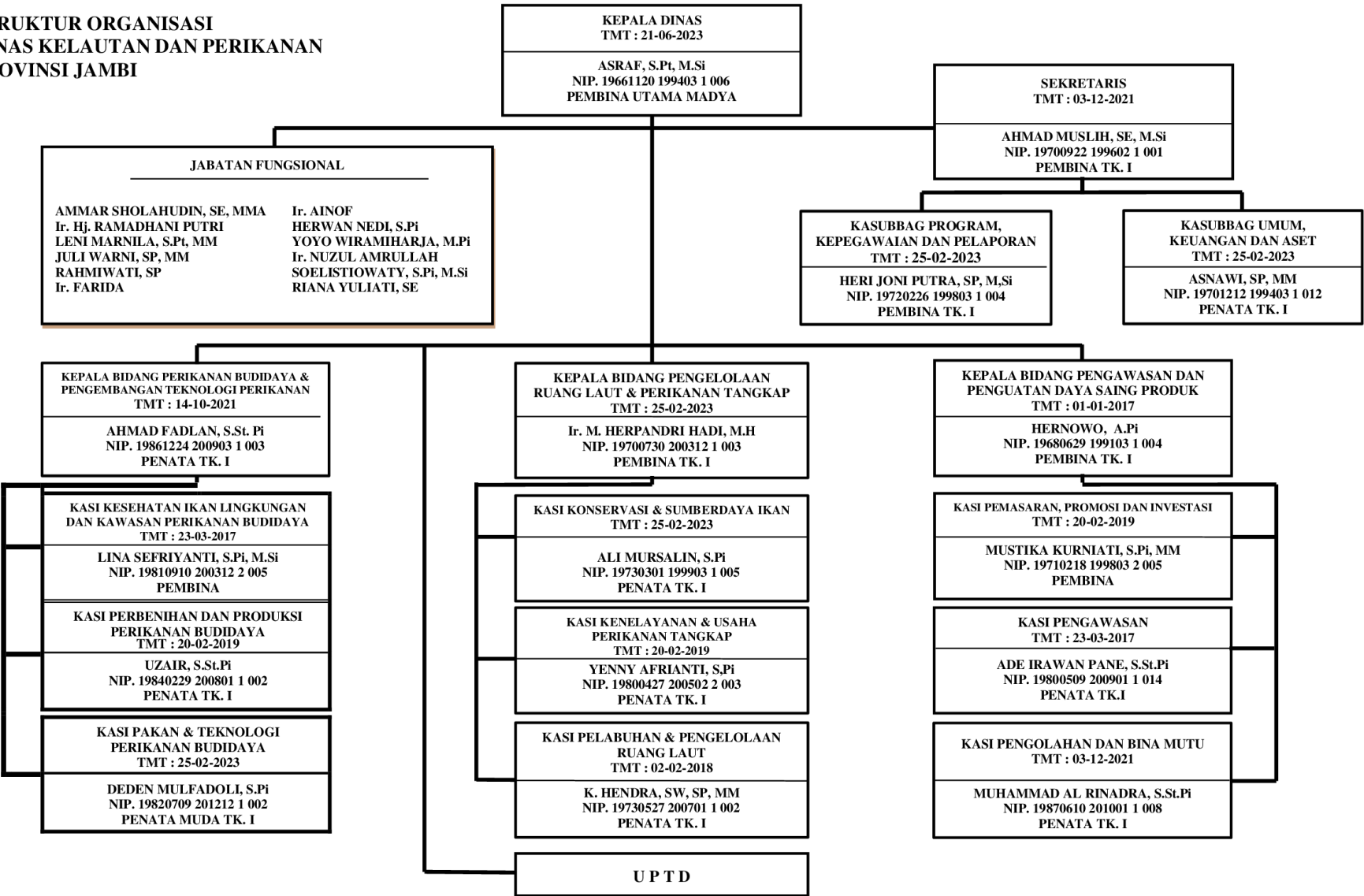
1.1. Struktur Organisasi

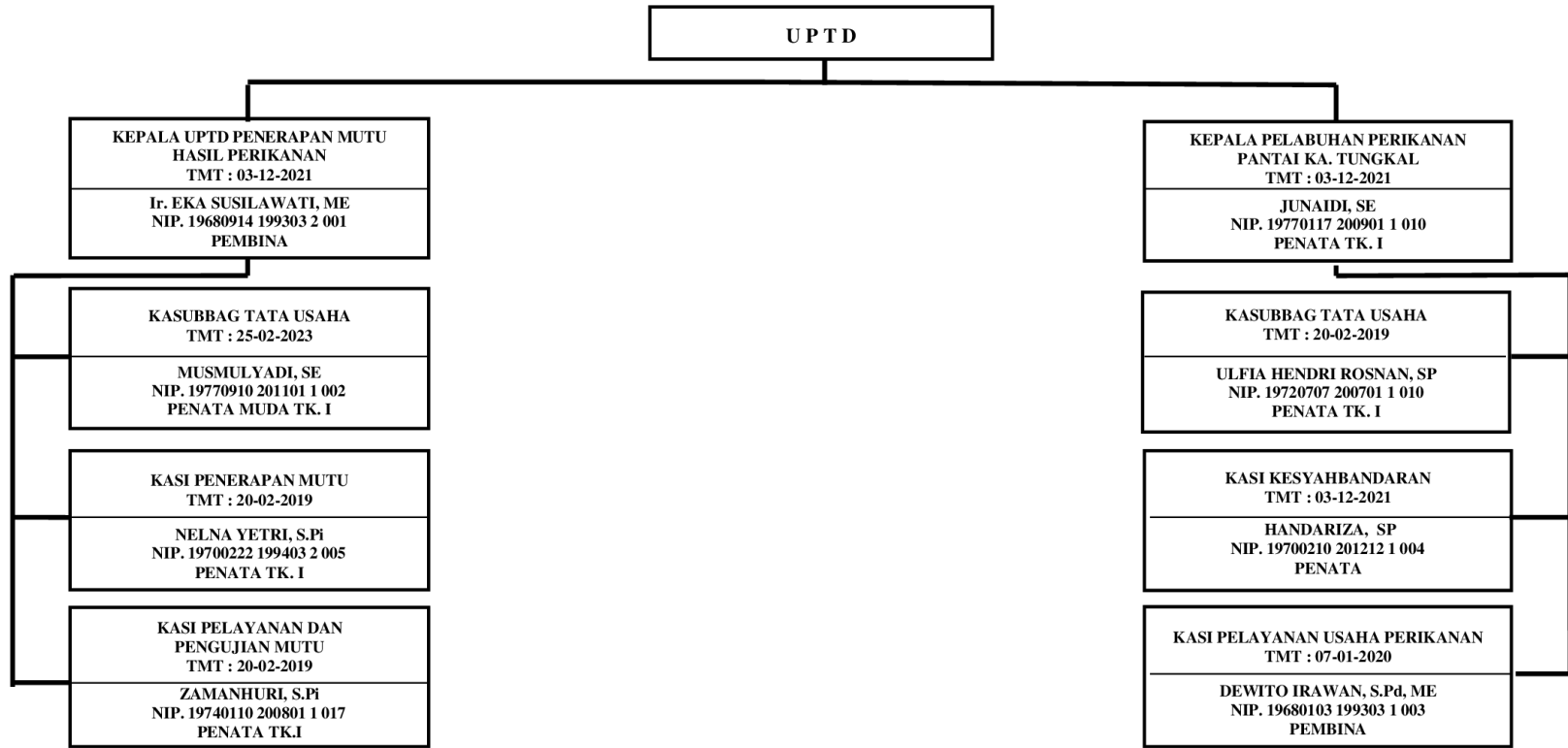
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 14 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebelumnya bernama Dinas Perikanan Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 1996 tanggal 18 November 1996 tentang Struktur Organisasi Dinas Perikanan Provinsi Jambi.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI**





1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 51 Tahun 2016 adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan, pengelolaan ruang laut dan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengembangan teknologi perikanan, pengawasan dan penguatan daya saing produk;
- e. Perumusan Kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat hambatan dan permasalahan serta isu strategis yang secara langsung dan tidak

langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal. Isu strategis yang berkembang pada pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta pengolahan hasil kelautan dan perikanan,
2. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum ramah lingkungan,
3. Biaya produksi nelayan, pembudidaya dan unit pengolahan ikan relatif masih tinggi,
4. Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan,
5. Masih rendahnya produksi dan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.

1.4. Keadaan Pegawai

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Pada Dinas Kelautan dan Perikanan, serta, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerapan Mutu Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dengan rincian sebagai berikut :

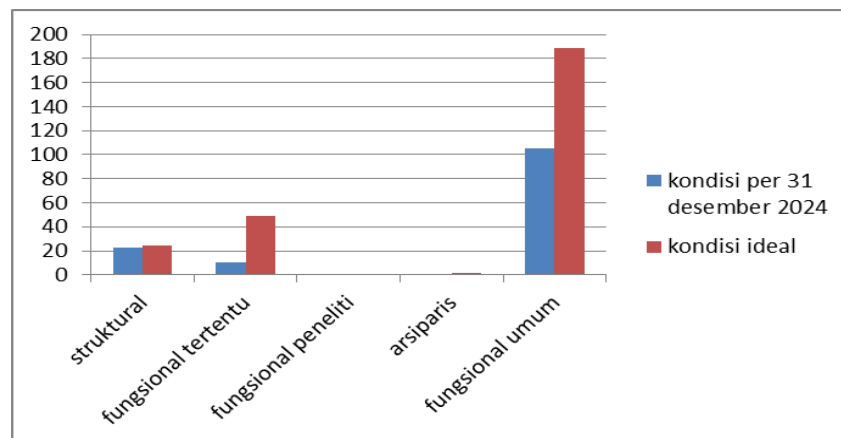
- a. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Program,Kepegawaian dan pelaporan
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset

- b. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - Seksi Perbenihan dan produksi
 - Seksi Kesehatan ikan, lingkungan dan kawasan perikanan budidaya
 - Seksi Pakan dan teknologi perikanan budidaya
- c. Bidang Pengelolaan ruang laut dan Perikanan Tangkap, membawahi :
 - Seksi Kenelayanan dan usaha perikanan tangkap
 - Seksi Konservasi dan sumberdaya ikan
 - Seksi Kepelabuhan dan pengelolaan ruang laut
- d. Bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk, membawahi:
 - Seksi Pengawasan
 - Seksi Pengolahan dan bina mutu
 - Seksi pemasaran, promosi dan investasi
- e. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal, membawahi :
 - Subbag Tata usaha
 - Seksi Kesyahbandaran
 - Seksi Pelayanan Usaha Perikanan
- f. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - Subbag TU
 - Seksi Penerapan Mutu
 - Seksi Pelayanan dan Pengujian Mutu

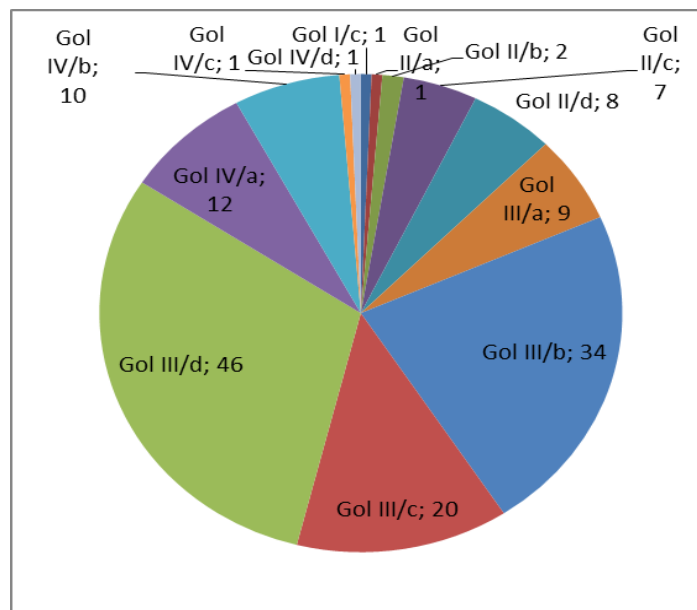
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi sumberdaya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 138 pegawai yang terdiri dari 23 pejabat struktural, 10 pejabat fungsional tertentu, dan 105 fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi disajikan dalam gambar berikut :

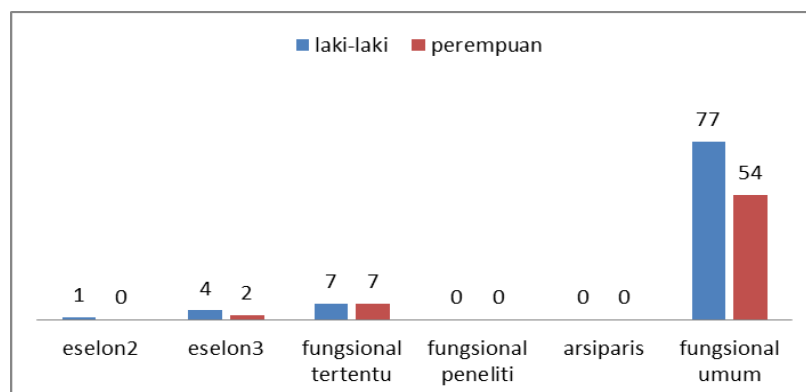
Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024



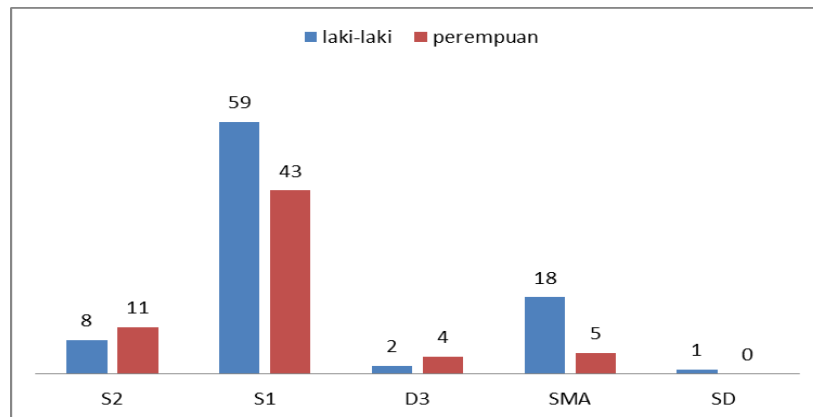
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



Gambar 1.4 Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi Tahun 2023



Gambar 1.5 Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini asset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	1	Baik
2	Alat-alat angkutan	67	Baik
3	Alat bengkel dan alat ukur	55	Baik
4	Alat pertanian	221	Baik
5	Alat kantor dan rumah tangga	1.075	Baik
6	Alat Studio dan alat komunikasi	92	Baik
7	Alat kedokteran dan kesehatan	16	Baik
8	Alat Laboratorium	34	Baik
9	Alat Persenjataan	10	Baik
10	Komputer	208	Baik
11	Bangunan gedung	206	Baik
12	Jaringan	161	Baik
13	Aset lainnya	67	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada tahun 2024 anggaran Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 37.713.505.576,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan pada APBD perubahan menjadi Rp 39.078.706.742,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) atau bertambah sebesar 3,6% dengan rincian belanja operasional sebesar Rp. 31.061.672.103 (tiga puluh satu milyar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 8.017.034.639,- (delapan milyar

tujuh belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung dan tidak langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 39.078.706.742,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) untuk mendanai 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan termasuk rutin.

1.7 Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta potensi yang menjadi ruang lingkup perangkat daerah dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Perencanaan stratejik yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan potensi lahan dan kondisi yang dimiliki saat ini dan harapan yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang maka rumusan tujuan, sasaran dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6
2	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
			Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
			Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	50%	50%	50%
3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50
5	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB Indeks	A Indeks	A Indeks	AA Indeks	AA Indeks

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi serta permasalahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan maka tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan.
2. Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan.
4. Meningkatkan angka konsumsi ikan.
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Tujuan–tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dengan program-program yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta Program yang mendukung

Tujuan 1: Meningkatkan produksi perikanan	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Tujuan 2: Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	
Sasaran	Program
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
Tujuan 3: Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	
Sasaran	Program
Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Tujuan 4: Meningkatkan angka konsumsi ikan	
Sasaran	Program
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan 5: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	
Sasaran	Program
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 5 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan.
2. Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
3. Meningkatnya Pelaku usaha perikanan
4. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik.

Program kerja Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengacu kepada Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dengan menggariskan beberapa Program dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5. Program Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Pada tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan Kinerja sebagai proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran-sasaran tersebut disepakati sebagaimana diuraikan berikut.

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan 2 indikator sasaran yaitu: 1) jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K; 2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha); 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan ; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.
3. Meningkatnya pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
4. Meningkatnya angka konsumsi ikan dengan indikator sasaran Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	55.136,7
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	60.885,0
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	27.613,89
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	70%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%
3	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	28.282
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,60
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks (85)

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 39.078.706.742,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian belanja operasional sebesar sebesar Rp. 31.061.672.103 (tiga puluh satu milyar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 8.017.034.639,- (delapan milyar tujuh belas juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan).

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang bersumber dari APBD murni yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Prosen-tase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Rp 12.897.285.937,-	33,0%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan budidaya
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Rp 1.482.302.169,-	3,8%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Rp 14.253.774.877,-	36,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Rp 1.356.488.940,-	3,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 23.342.629.696,-	59,7%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara, membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional (jika ada), melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, melakukan analisis atas efektivitas penggunaan sumberdaya pendukung kinerja, melakukan analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria/ Kode warna
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	55.136,7	45.187,8	82,0	Tinggi
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	60.885,0	49.595,0	81,5	Tinggi
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0	Sangat Rendah
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	27.613,89	0	0	Sangat Rendah
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	70%	70%	100,0	Sangat Baik
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100,0	Sangat Baik
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	28.282	30.669	108,4	Sangat Baik
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,60	40,79	98,1	Sangat Baik
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A (85)	BB (77,2)	90,8	Sangat Baik

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki 9 (sembilan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2024, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dari total indikator dengan rata-rata persentase capaian sasaran sebesar 85,81%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 85,81%. Secara detail capaian kinerja tersebut dapat dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 Meningkatnya Produksi Perikanan

Sasaran ini dicapai memiliki 2 (dua) indikator sasaran yaitu: (1) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton), dan; (2) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton). Indikator ke-1 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 mil
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

Sedangkan indikator ke-2 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) dicapai melalui program pengelolaan perikanan budidaya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	55.136,7	45.187,8	82,0
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	60.885,0	49.595,0	81,5

Untuk indikator ke-1 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap dengan target indikator di tahun 2024 sebesar 55.136,7 ton telah terealisasi sebesar 45.187,8 ton dengan capaian sebesar 82%. Dapat dikatakan untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap capaian tahun 2024 sudah hampir memenuhi target. Sedangkan untuk indikator ke-2 yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dengan target indikator sebesar 60.885,0 ton telah terealisasi sebesar 49.595 ton dengan capaian sebesar 81,5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan adalah sebesar 81,75%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

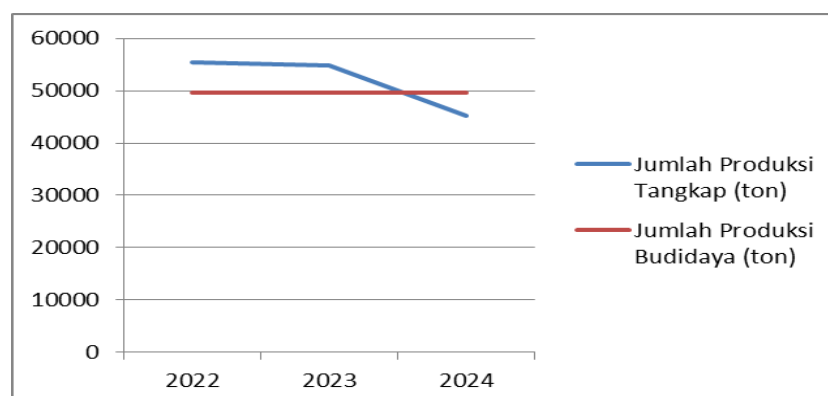
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tahun 2024 serta Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024*	% capaian
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	55.347,5	54.807,5	54.807,8	45.187,8	82%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.666,9	49.548,9	58.997,0	49.595	81,5%

*Realisasi sementara

Untuk kedua indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan dan belum dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1 Perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya



Dapat dilihat pada gambar 3.1 jumlah produksi perikanan tangkap pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami sedikit penurunan, sedangkan pada jumlah produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir sehingga di tahun 2024 terealisasi melebihi 2 (dua) tahun terakhir.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024* %	Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.857,3	55.136,7	82%	55.800,3	81%
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.428,9	60.885,0	81,5%	64,843,6	76,5%

Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap jika dilihat capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2026 telah tercapai sebesar 82%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya dengan target produksi tahun 2026 sebesar 64.843 ton capaian pada tahun 2024 sebesar 81,5%.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap adalah anggaran APBD/APBN pada program pengelolaan perikanan tangkap. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal perikanan dan perizinan. Kegiatan akan berhasil apabila ditunjang oleh adanya identifikasi kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta adanya monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun jika dibandingkan realisasi capaian dengan target Nasional pada Indikator Produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Provinsi Jambi dengan Target Nasional

Indikator	Realisasi Provinsi Jambi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Kontribusi Provinsi Jambi Terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Provinsi Jambi Tahun 2024*	Target Nasional Tahun 2024	Capaian Provinsi Jambi Terhadap Target Nasional Tahun 2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	54.807,5	7,77 juta	0,71%	45.187,8	6 juta	0,75%
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	49.548,9	6,20 juta	0,79%	49.595	12 juta	0,41%

*Angka Sementara

Jika dilihat pada tabel tersebut jumlah produksi perikanan tangkap Provinsi Jambi di tahun 2023 berkontribusi terhadap jumlah produksi perikanan tangkap Nasional sebesar 0,71% dan realisasi produksi perikanan tangkap Provinsi Jambi di tahun 2024 tercapai 0,75% jika dibandingkan dengan target Nasional. Sementara jumlah produksi perikanan budidaya Provinsi Jambi tahun 2023 berkontribusi sebanyak 0,79% terhadap realisasi produksi perikanan budidaya ikan Nasional tahun 2023 dan produksi perikanan provinsi Jambi di tahun 2024 tercapai 0,41% jika dibandingkan dengan target Nasional.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan alat tangkap dan kapal
- b. Bimtek keterampilan nelayan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Ombak besar.
- b. Harga BBM mahal.
- c. Alat tangkap yang sudah tidak layak untuk digunakan untuk penangkapan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan subsidi BBM kepada nelayan.
- b. Memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik tangkapan laut dan maupun perairan umum.

Sedangkan sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya adalah sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, sumberdaya alam, dan ketersediaan anggaran. Sumberdaya pendukung kinerja tersebut dapat efektif dengan mengadakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang efektif, dan penggunaan anggaran yang efisien.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya bantuan pemerintah
- b. Tingginya permintaan pasar
- c. Mudahnya akses informasi teknologi perikanan budidaya

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya produksi perikanan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga pakan
- b. Alih fungsi lahan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri
- b. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan
- c. Pemberian bantuan benih dan pakan ikan serta sarana dan prasarana pembudidaya ikan

Pada sasaran meningkatnya produksi perikanan ini untuk indikator jumlah produksi perikanan budidaya merupakan jumlah produksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi baik pembudidayaan jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, minapadi dan tambak sederhana.

Sasaran #2 Meningkatnya Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran ini dicapai memiliki 4 (empat) indikator sasaran yaitu: (1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K; (2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha); (3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; (4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Indikator ke-1 yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dan indikator ke-2 yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dicapai melalui program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar Minyak dan Gas Bumi
- Sedangkan indikator ke-3 yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan indikator ke-4 yaitu Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dicapai melalui program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil
 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	27.613,89	0	0
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	70%	70%	100,0
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100,0

Untuk indikator ke-1 yaitu Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K dengan target indikator di tahun 2024 sebanyak 2 izin terealisasi sebanyak 0 izin dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan lahirnya UU no.11/2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP. Target pada indikator sasaran ini akan diajukan perubahan dari 2 izin menjadi 2 rekomendasi pada perubahan Renstra. Indikator ke-2 yaitu Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) dengan target indikator sebesar 27.613,89 Ha terealisasi sebesar 0 Ha dengan capaian sebesar 0,00%. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang secara khusus diperuntukkan merealisasikan kegiatan. Indikator ke-3 yaitu Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan target di tahun 2024 sebesar 70% terealisasi sebesar 70% dengan capaian sebesar 100%, meningkat terhadap persentase tingkat kepatuhan berdasarkan data pelaku usaha perikanan dari 11 Kabupaten/Kota. Dan indikator ke-4 yaitu Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan target di tahun 2024 sebesar 50% terealisasi sebesar 50% dengan capaian 100%, tetap sama dengan target tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran. Sehingga dapat

dikatakan bahwa capaian rata-rata untuk sasaran Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesar 50%.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 %	Target 2026	Capaian s/d 20224 terhadap target 2026
2.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	-	2 izin	0,00	2 Izin	0,00%
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	-	27.613,89	0,00	39.143,44	0,00%
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-	74,21%	70%	100%	95,4%	73,4%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan	-	50%	100%	50%	100%

Pada indikator Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K jika dilihat capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 telah tercapai sebesar 0,00% pada tahun 2026 akan tercapai target yang telah ditetapkan apabila target sudah berubah menjadi 2 rekomendasi dan proses integrasi RZWP3K dengan RTRW terlaksana dan ditetapkannya Perda RTRW. Pada indikator Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) jika dibandingkan dengan target 2024, target pada tahun 2026 akan tercapai apabila adanya ketersediaan anggaran. Pada indikator Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target

tahun 2026 telah tercapai sebesar 73,4%. Meningkatnya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan karena sudah terlaksananya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan. Dan pada indikator Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian di tahun 2024 jika dibandingkan terhadap target di tahun 2026 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah PPNS, Pengawas perikanan dan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K adalah sumberdaya manusia, yang akan efektif jika adanya peningkatan sumberdaya manusia di bidang GIS. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) adalah adanya kepastian hukum Kawasan Konservasi Perairan Daratan (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan adalah ketersediaan anggaran APBD/APBN, kapal pengawas, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan serta keterlibatan aparat terkait dari dinas Kabupaten/Kota. Kegiatan Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh pendukung kinerja yang saling bekerjasama. Dan sumberdaya pendukung pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah anggaran APBD/APBN, PPNS, pengawas perikanan dan staf pengawasan. Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi efektif jika didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang saling bekerja sama.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain integrasi RTRW dengan RZWP3K yang sedang dalam proses. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain perlunya pendanaan yang cukup agar kegiatan dapat terlaksana. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang

taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain adanya kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K antara lain sebagai berikut :

- a. Lahirnya UU no 11 / 2020 bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 28/2021 Pasal 139 (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan di Perairan Pesisir kepada Gubernur sepanjang RZWP3K telah integrasi dengan RTRWP

Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain belum tersedianya anggaran. Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana prasarana pengawasan yang kurang memadai
- b. Kurangnya anggaran yang tersedia

Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah tidak adanya PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Rencana tindak lanjut dan alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan selama tahun 2024 antara lain pada indikator pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K adalah proses integrasi RZWP3K dengan RTRW segera terlaksana dengan ditetapkannya Perda RTRW serta realisasi luasan usaha dan pemanfaatan ruang yang perlu disesuaikan dengan aturan. Pada indikator kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) antara lain perlunya ketersediaan anggaran serta Menyiapkan dokumen-dokumen untuk penetapan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi (telah terbit SK

Gubernur Jambi tentang Pokja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi serta SK Kepala Dinas tentang Tim Teknis Penetapan Kawasan Konservasi). Pada indikator persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dengan adanya penambahan personil pengawas, PPNS dan pengadaan sarana prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan antara lain adalah penambahan jumlah PPNS di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Sasaran #3 Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha Perikanan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	28.282	30.669	108,4

Sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan dengan indikator jumlah pelaku usaha perikanan, di tahun 2024 terealisasi sebanyak 30.303 RTP dari target 28.282 RTP dengan persentase capaian sebesar 108,4%.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelaku Usaha s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
3.	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)		28.282	108,4	28.965	105,8%

Jika dilihat capaian pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 telah tercapai sebesar 104,62%, pada tahun 2026 akan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha adalah anggaran APBD/APBN dan stakeholder terkait. Untuk meningkatkan efektifitas sumberdaya pendukung peningkatan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap, perlu adanya kegiatan bimtek keterampilan nelayan, kegiatan pengawakan kapal dan perizinan. Sedangkan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan efektif jika sumberdaya pendukung kinerja solid dan salong bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang pengolahan dan pemasaran yaitu adanya kepatuhan kelayakan usaha pengolahan dan pemasaran berdasarkan NIB dan / atau sertifikat SKP / GMP serta adanya ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan pelaku usaha perikanan..

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pelaku usaha perikanan antara lain di bidang perikanan tangkap adalah adanya penurunan hasil tangkapan karena adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), bahan bakar yang mahal, dan kebanyakan nelayan menangkap ikan skala kecil sehingga tidak memenuhi pencapaian target penangkapan

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan bimtek keterampilan nelayan
- b. Memberi bantuan kepada nelayan
- c. Memberikan bantuan subsidi BBM berupa uang kepada nelayan
- d. Terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah
- e. Pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan
- f. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam konsumsi ikan

Sasaran #4 Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan

Sasaran ini dicapai melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya angka konsumsi ikan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,60	40,79	98,1

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) di tahun 2024 sebesar 41,0 kg/kapita/tahun, capaian AKI 2024 yaitu 40,79 kg/kapita/tahun sehingga berdasarkan capaian tersebut sudah melebihi target yakni 98,1%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

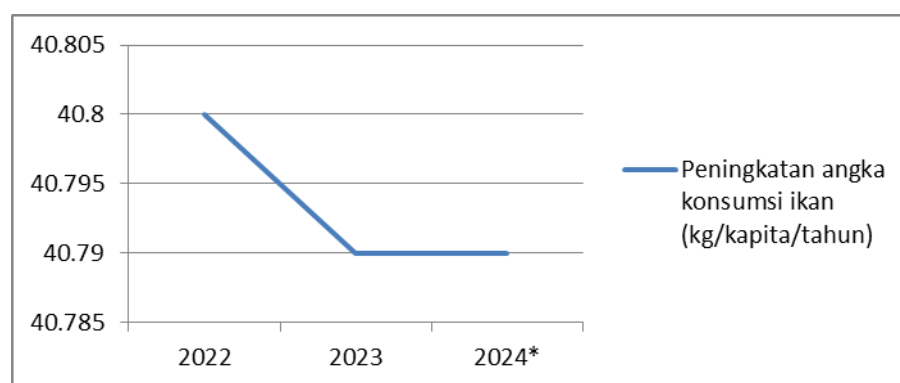
Tabel 3.12. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Angka konsumsi ikan Tahun 2024 serta Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Realisasi		
			2022	2023	Target	Realisasi*	% capaian
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,8	40,79	41,6	40,79	98,1

*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini pada tahun-tahun sebelumnya belum ditargetkan sehingga tidak dapat membandingkan capaian sehingga yang dibandingkan adalah realisasinya. Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi angka konsumsi ikan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut :

Gambar 3.3 Perbandingan realisasi angka konsumsi ikan



Dapat dilihat pada gambar tersebut angka konsumsi ikan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan di tahun 2023, akan tetapi penurunan yang terjadi tidak cukup signifikan sehingga dengan optimis di tahun 2024 akan terjadi peningkatan meskipun angka konsumsi ikan tahun 2024 belum rilis.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan s.d Jangka Menengah Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
4.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,20	41,6	98,1%	42,50	96%

Dari target Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2026 sebesar 42,5 kg/kapita/tahun, dan capaian AKI 2024 yang masih berdasarkan angka capaian 2023 maka diprediksi capaian 2026 akan memenuhi (minimal mendekati) angka target AKI tahun 2026 dengan didukung anggaran yang memadai dan sumberdaya kinerja.

Adapun jika dibandingkan realisasi capaian dengan target Nasional pada Indikator Produksi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dengan Target Nasional

Indikator	Realisasi Provinsi Jambi Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Provinsi Jambi Terhadap Realisasi Nasional Tahun 2023	Realisasi Provinsi Jambi Tahun 2024*	Target Nasional Tahun 2024	Capaian Provinsi Jambi Terhadap Target Nasional Tahun 2024
Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,79	57,61	70,8%	40,79	62,5	65,3%

*Angka Sementara

Jika dilihat pada tabel tersebut Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jambi di tahun 2023 Jika dibandingkan terhadap realisasi Angka Konsumsi Ikan Nasional sebesar adalah sebesar 70,8% dan realisasi Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jambi di tahun 2024 tercapai 65,3% jika dibandingkan dengan target Nasional

Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah anggaran APBD/APBN, Pembina mutu, analis pasar hasil perikanan, pengawas perikanan, jajaran pelaksana bidang pengawasan dan penguatan daya saing dan produk, dinas Kabupaten/Kota terkait serta instansi terkait lainnya. Kegiatan pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan menjadi efektif apabila didukung oleh sumberdaya pendukung kinerja yang solid dan asling bekerja sama dengan baik.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain sebagai berikut :

- a. Minat masyarakat yang tinggi untuk mengkonsumsi ikan
- b. Ragam inovasi produk olahan guna peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam peningkatan angka konsumsi ikan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain rendahnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain terus menggalakkan sosialisasi/kampanye GEMARIKAN ke daerah serta pelatihan/bimtek/demo pengolahan guna peningkatan skill pengolahan dan pemasaran ikan serta peningkatan mutu dan keamanan pangan dalam upaya peningkatan konsumsi ikan.

Sasaran #5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini dicapai melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A Indeks	BB Indeks	90,8%

Terlihat pada tabel diatas, untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik telah tercapai 96,5%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

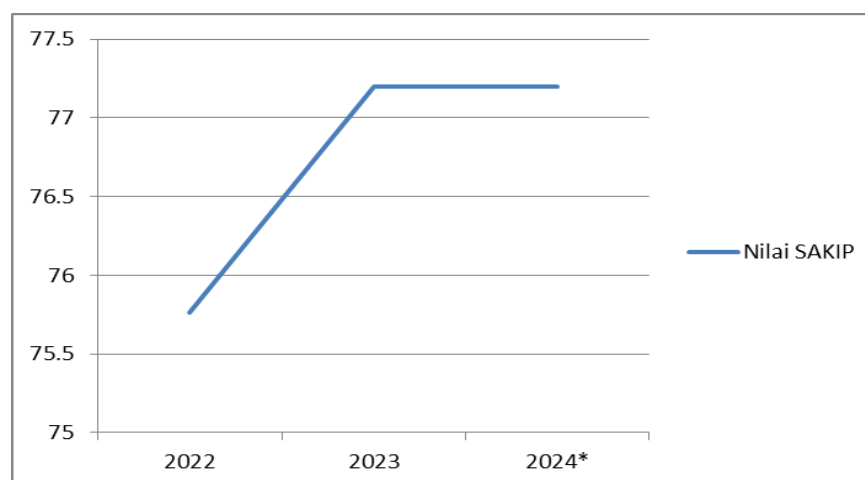
Tabel 3.16. Realisasi Kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 serta Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Capaian/ Realisasi		Capaian/ Realisasi		
			2022	2023	Target	Realisasi*	% capaian
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) / Nilai SAKIP	BB 75,76	BB 77,2	A 85	BB 77,2	90,8

*Realisasi sementara

Untuk indikator pada sasaran ini lebih jelasnya dapat dilihat perbandingan realisasinya pada gambar 3.5 berikut :

Gambar 3.5 Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2022-2024*



Dapat dilihat pada gambar 3.5 Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Jika dilihat perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik s.d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Awal RPJMD 2021	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 %	Target 2026	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB	A	90,8	AA	81,3

Berdasarkan tabel 3.17 capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target di tahun 2026 yaitu AA Indeks maka kemungkinan akan tercapai. Sumberdaya pendukung pencapaian kinerja sasaran ini adalah sumberdaya manusia dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh inspektorat yang merekomendasikan perbaikan terhadap tiga hal berikut:

- Agar diselaraskan Indikator Kinerja IKU dengan Perjanjian Kinerja (PK);
- Informasi tentang perbandingan realisasi capaian kinerja PD / Pemda dengan data realisasi capaian Nasional (*Benchmark* Kinerja) pada Laporan Kinerja;
- LKj belum memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu target kinerja belum mencapai 100% sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen dan informasi tentang perbandingan realisasi capaian kinerja PD/Pemda dengan data realisasi capaian Nasional.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain adalah konsistensi dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja baik di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Instansi Pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini antara lain kurangnya anggaran untuk melakukan koordinasi. Alternatif solusi yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain melakukan Rakortekrenbang.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 89,08% atau sebesar Rp 34.811.273.571,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dari anggaran sebesar Rp 39.078.706.742,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 terealisasi secara efisien.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Per Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	55.136,7	45.187,8	82,0	7.738.849.053	4.755.245.097	61,4
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	60.885,0	49.595,0	81,5	5.158.436.884	5.046.464.837	97,8
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 izin	0	0	809.816.080	770.862.064	95,2
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	27.613,89	0	0			
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	70%	70%	100,0	672.486.089	611.292.891	90,9
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	100,0			
3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	28.282	30.669	108,4	14.253.774.877	11.098.462.899	77,9
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,60	40,79	98,1	1.356.488.940	1.296.752.965	95,6
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A (85)	BB (77,2)	90,8	23.342.629.696	22.330.655.717	95,7

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	82,0%	7.738.849.053	4.755.245.097	6.345.856.223	1.590.611.126	0,21
	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	81,5%	5.158.436.884	5.046.464.837	4.204.126.060	-842.338.776	-0,16
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	0%	809.816.080	770.862.064	0	-770.862.064	-0,95
	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	0%					
	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	100,0%	672.486.089	611.292.891	672.486.089	61.193.198	0,09
	Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	100,0%					
Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	108,4%	14.253.774.877	11.098.462.899	15.451.091.966	4.352.629.067	0,31
Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	98,1%	1.356.488.940	1.296.752.965	1.330.715.650	33.962.685	0,03
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	90,8%	23.342.629.696	22.330.655.717	21.195.107.763	-1.135.547.953	-0,05
Total		561%	53.332.481.619	45.909.736.470	299.088.556.919	253.178.820.449	4,75

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.19 diatas, terdapat 4 (empat) indikator sasaran strategis yang telah tergolong efisien dengan **efisiensi total sebesar 4,75**. Pada **sasaran meningkatnya produksi perikanan**, indikator ke-1 yaitu jumlah produksi perikanan tangkap (ton) tercapai sebesar 82% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.755.245.097,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) tergolong efisien dengan nilai efisien sebesar 0,21. Sedangkan indikator ke-2 yaitu jumlah produksi perikanan budidaya (ton) tercapai sebesar 81,5% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.046.464.837,- (lima milyar empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tergolong tidak efisien dengan nilai efisien sebesar -0,16. Pada **sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan**, untuk indikator ke-1 yaitu pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K tercapai sebesar 0% dan indikator ke-2 yaitu kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) yang tercapai sebesar 0% dengan realisasi anggaran kedua indikator tersebut sebesar Rp 770.862.064,- (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam puluh empat rupiah) tergolong tidak efisien dengan nilai efisien sebesar -0,95. Sedangkan indikator ke-3 yaitu persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tercapai sebesar 100% dan indikator ke-4 yaitu persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tercapai 100% dengan realisasi anggaran kedua indikator tersebut sebesar Rp 611.292.891,- (enam ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) tergolong efisien dengan nilai efisien sebesar 0,09. Pada **sasaran meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan** dengan indikator jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tercapai sebesar 108, 4% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.098.462.899,- (sebelas milyar Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) tergolong efisien dengan nilai efisien sebesar 0,91. Pada **sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan** dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) tercapai sebesar 98,1% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.296.752.965,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima rupiah) tergolong efisien dengan nilai efisien sebesar 0,03. Pada **sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik** dengan

indikator predikat akuntabilitas kinerja (SAKIP) tercapai sebesar 90,8% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22.330.655.717,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tergolong tidak efisien dengan nilai efisien sebesar -0,05.

IV. PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah, dengan indikator :
 - a. Untuk sasaran Meningkatnya produksi perikanan, terdapat 2 (dua) indikator sasaran yaitu: 1) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), dan; 2) Jumlah produksi perikanan tangkap (ton). Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk indikator 1) Jumlah produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 adalah sebesar 82% dan untuk indikator 2) Jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2024 adalah sebesar 81,5%.
 - b. Sasaran meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, terdapat 4 indikator sasaran yaitu: 1) Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00%; 2) Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha) capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,00%; 3) Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan; 4) Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada tahun 2024 adalah sebesar 100,0%.
 - c. Sasaran meningkatnya Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan, dengan indikatornya Jumlah rumah tangga perikanan (RTP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 108,4%.

-
- d. Sasaran meningkatnya angka konsumsi ikan, dengan indikatornya Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 98,1%.
 - e. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikatornya Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 90,8%
2. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti masih terbatasnya kualitas dan jumlah sumberdaya manusia. khususnya yang berpendidikan teknis kelautan dan perikanan yang ada di UPT /Instansi serta di lapangan, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pencapaian kinerja dalam bidang pembinaan dan penyuluhan perikanan. Guna mengantisipasi permasalahan yang ada perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Selalu konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, juga dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, serta instansi pemerintah lainnya maupun pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
 - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategik yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
 - c. Memaksimalkan bantuan kapal > 30 GT dari pemerintah pusat sehingga wilayah tangkapan nelayan dapat menjangkau daerah yang lebih luas, serta memberikan bantuan alat penangkapan ikan bagi nelayan.
 - d. Diperlukan rekrutmen tenaga teknis baru yang berpendidikan teknis perikanan. Selain itu telah diupayakan untuk memberikan kesempatan berlatih dan magang kepada aparat yang ada.
 - e. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card (BSC)* yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan LAKIP yang ke-24 (dua puluh empat). Namun demikian LKJ ini masih memerlukan penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, Oleh karena itu, masukan-masukan yang konstruktif sangat diperlukan bagi penyempurnaan dan pengembangan dimasa mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan/Sasaran)

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2026

IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 14. Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	54.480,9	54.807,8	55.136,7	55.467,5	55.800,3
			Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	57.168,0	58.997,0	60.885,0	62.833,0	64.843,6
2	Meningkatkan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin	2 Izin
			Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	10.687,49	16.400,53	27.613,89	33.447,08	39.143,44
			Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	60%	65%	70%	75%	77%
			Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%	50%	50%	50%	50%
			Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
3	Meningkatkan jumlah pelaku usaha perikanan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	27.615	27.947	28.282	28.622	28.965
4	Meningkatkan angka konsumsi ikan	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	40,60	41,00	41,60	42,00	42,50

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang akan diimplementasikan dalam tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan produksi perikanan,

58

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASRAF, S.Pt, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**
Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,

ASRAF, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	55.136,7
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	60.885,0
2	Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.	Jumlah izin pengelolaan ruang laut oleh masyarakat pesisir maupun pengusaha sesuai Perda RZWP3K	2 Izin
		Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	27.613,89
		Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	70%
		Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	50%
3	Meningkatnya pelaku usaha perikanan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP)	28.282
4	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	41,60
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	A (85,00)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 22.972.614.530,-	APBD
2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp 809.816.080,-	APBD
3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 7.253.849.053,-	APBD + DAK
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 5.158.436.884,-	APBD + DAK
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp 672.486.089,-	APBD + DAK
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 846.302.940,-	APBD
TOTAL	Rp 37.713.505.576,-	APBD + DAK

Gubernur Jambi,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi,


ASRAF, S.Pt, M.Si
 Pembina Utama Madya

Lampiran 3 Matriks Pengukuran Kinerja tahun 2024

Matriks Pengukuran Kinerja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2024																
NO	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan		
						Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	23.342.629.696	23.342.629.696	22.330.655.717	95.66	A (86.00)	Indeks	-	0.00	Nilai belum dikeluarkan oleh Instansi terkait		Menunggu rilis nilai dari Instansi terkait		
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja dinas kelautan dan perikanan	642.652.100	642.652.100	538.013.800	83.73	2	Laporan	2	100.00					
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	179.899.600		149.977.600	83.37	2	Dokumen	2	100.00					
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	157.831.200		118.829.200	75.29	10	Laporan	10	100.00					
		3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	304.851.300		269.207.000	88.31	1	Laporan	1	100.00					
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelola administrasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	20.841.385.107	20.841.385.107	20.104.251.433	96.46	12	Bulan	12	100.00					
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20.542.766.707		19.823.450.833	96.50	156	ang/Bulan	156	100.00					
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	298.598.400		280.800.600	94.04	1	Dokumen	1	100.00					
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	162.722.400	162.722.400	129.045.600	79.30	100	%	100	100.00					
		1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	162.722.400		129.045.600	79.30	2	Laporan	2	100.00					
4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertelaksananya Disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	147.887.200	147.887.200	122.559.200	82.87	1	Tahun	1	100.00					
		1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	18.000.000		14.660.000	81.44	20	Orang	20	100.00					

1	2	3	4	5	6	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						7	8	9	10	11	12			
NO	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan	%			
1	2	2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	129,887,200		107,898,200	83.07	200	Orang	-	0.00	13	14	14
5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	508,033,770	508,033,770	429,066,470	84.46	12	Bulan	12	100.00	13	14	14
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	74,517,520		72,973,320	97.93	5	Paket	5	100.00	13	14	14
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	22,800,000		11,834,000	51.90	2	Paket	2	100.00	13	14	14
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35,024,250		35,024,250	100.00	2	Paket	2	100.00	13	14	14
		4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8,640,000		8,640,000	100.00	1	Dokumen	1	100.00	13	14	14
		5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	367,062,000		300,594,900	81.89	12	Laporan	12	100.00	13	14	14
6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	115,606,000	115,606,000	115,531,000	99.94	12	Bulan	12	100.00	13	14	14
		1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	27,406,000		27,406,000	100.00	10	Unit	10	100.00	13	14	14
		2. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	88,200,000		88,125,000	99.91	10	Unit	10	100.00	13	14	14
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	538,108,119	538,108,119	509,802,360	94.74	12	Bulan	12	100.00	13	14	14
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5,000,000		5,000,000	100.00	1	Laporan	1	100.00	13	14	14
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	533,108,119		504,802,360	94.69	4	Laporan	4	100.00	13	14	14

No	Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per Tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I	8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	386.325.000	386.325.000	382.396.954	98,99	12	Bulan	12	100,00			
		1. Sub Kegiatan Penediahan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	208.310.000		207.793.954	99,75	59	Unit		59	100,00		
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	152.675.000		150.196.900	98,38	4	Unit		4	100,00		
		3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25.340.000		24.396.000	96,27	20	Unit		20	100,00		
II		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah izin pengelolaan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang diterbitkan	809.816.080	809.816.080	770.862.064	95,19	2	Izin	-	0,00	Usulan pengajuan izin tidak diterimal/tidak direkomendasi	Rasionalisasi luasan usaha dan pemanfaatan ruang perlu disesuaikan dengan aturan	Tidak ada rekomendasi yang diterbitkan
		Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan	Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan					27.613,89	Ha	-		Tidak tersedianya anggaran untuk penetapan kawasan konservasi perairan daerah	Menyiapkan dokumen-dokumen untuk penetapan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan terbit Peraturan Gubernur SK Gubernur Jambi tentang Pokja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi serta SK Kepala Dinas tentang Tim Teknis Penetapan Kawasan Konservasi)	Menyapkan dokumen-dokumen untuk penetapan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan terbit Peraturan Gubernur SK Gubernur Jambi tentang Pokja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi serta SK Kepala Dinas tentang Tim Teknis Penetapan Kawasan Konservasi)

NO	Kode	Usuan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja/program (outcome/kegiatan) (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
1	1	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dari Pemerintah Pusat	Persentase wilayah pesisir yang dikelola berdasarkan RZWP-PSK	809,516,080	809,516,080	770,862,064	95.19	75	%	-	0.00	Pelembutan ujung-ujung belum operasional konservasi belum penataan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Perencanaan Kawasan Konservasi	
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dari Pemerintah Pusat	Luasan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	577,968,080		543,032,461	93.96	5,713.04	Ha	-	0.00	Tidak tersedianya anggaran untuk penempatan kawasan konservasi perairan daerah	Teloh dilaksanakan Survey Biologis dan Sosial Ekonomi pada KKPD 01 Seberang Kota Kab. Tanjung Jabung Barat dengan luasan 2.570,24 Ha	Perlu dukungan untuk pelaksanaan Konsultasi Teknis dan Konsultasi Publik sehingga bisa diajukan penempatan Kawasan tersebut sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Seberang Kota dan KKPD Lainnya.
		2. Sub Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh informasi terkait mitigasi bencana melalui program mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	231,846,000		227,829,603	98.27	60	Orang	-	0.00	Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan sosialisasi	Dukungan anggaran yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan	
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	7,738,849,053	7,738,849,053	4,755,245,057	61.45	55,136.7	Ton	45,187.8	82.0	Berkurangnya alokasi anggaran dari tahun sebelumnya, terdapat dari pemerintah baik pusat maupun daerah	1. Perlu dukungan anggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kegiatan penangkapan ikan bagi usaha perikanan tangkap	
1		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Daratan 12 Mil	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di laut	744,141,600	744,141,600	726,805,000	97.67	50,320.0	Ton	40,573.8	80.6	Perubahan musim cuaca dan suhu air yang ekstrim, gelombang tinggi dan keterbatasan sarana prasarana, subsidi BBM yang terbatas, biaya operasional tinggi	2. Perlu kebijakan pemerintah untuk Nelayan Perikanan	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	744,141,600		726,805,000	97.67	2,500	Unit	348	13.9	Rumsum, upah ABK, harga ikan menurun terutama udang kelak, sehingga sangat mempengaruhi capaian target produksi perikanan.		
2		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di PUD	600,159,210	600,159,210	588,590,400	98.07	4,816.7	Ton	4,614.0	95.8	Selain itu berkurangnya sumberdaya ikan untuk tempat berpijaknya ikan baik di laut maupun perairan umum (kurangnya lahan mangrove, adanya pesanggrahan, dan sebagainya) serta penanaman air sungai Belanghassi		
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap di PUD	600,159,210		588,590,400	98.07	350	Unit	2	0.57	Belum dilaksanakannya kawasan konservasi perairan daerah (laut)		

NO	Kode	Urusan/ bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome/ kegiatan (output))	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
IV	3	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengelolaan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal yang bertambah di pelabuhan perikanan	6,394,548,243	6,394,548,243	3,433,846,597	53.79	4,180	Kapal	3,359	80.36	Jumlah kapal yang mendarat di PPP Kuala Tungkal tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan PPP Kuala Tungkal hanya 1 penampung	- Perlu mendaratkan penampung ikan di pelabuhan ikan labuh dengan PPP Kuala Tungkal	
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	6,144,515,443		3,198,077,700	52.05	1	Unit	1	100.00	- Kondisi kolam pelabuhan sangat dangkal saat air surut, sehingga kapal tidak bisa sandar di dermaga	- Adanya regulasi yang mewajibkan kapal-kapal ikan untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPP Kuala Tungkal (PERDAPERGUB)	
		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan	Fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan yang terlaksana	250,032,800		241,768,997	96.69	2	Layanan	2	100.00	- Belum adanya kesadaran dari nelayan untuk mendaratkan ikannya di PPP Kuala Tungkal	- Penambahan tempat penampungan ikan	
IV		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	5,158,436,884	5,158,436,884	5,046,464,837	97.83	60,885.0	Ton	45,595.0	81.46	- Tingginya harga pakan	- Pemberian bantuan mesin cetak pakan dan bahan baku	
												- Menurunya produksi dan alih fungsi lahan	- Pembinaan dan sertifikasi CPPIB, CEIB dan CPPIB	
												- Minimnya anggaran	- Penambahan anggaran	
1		Kegiatan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	144,108,800	144,108,800	142,550,200	99.92	9	Jenis	9	100.00			
		1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas daerah	Jumlah hasil ikan dan lingkungan yang teruji sehat	144,108,800		142,550,200	98.92	2	Dokumen	2	100.00			

No	Kode	Usuran/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan			Target Kinerja Perhitungan			Realisasi Capaian Kinerja			FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4		%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4		%				
						7	8				9	10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14			
	2	Kegiatan Pembudayaan Ikan di Perairan Darat	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5,014,328,084	5,014,328,084	4,903,914,837	97.80										
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien	Tersedianya prasarana pembudayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota	4,737,030,484		4,633,572,874	97.82	100	Unit	95	95.00					Penambahan anggaran untuk kegiatan pembudayaan ikan dan prasarana (jaki ikan, pakan, calon induk, kolam terpal, vitamin C khusus ikan) bagi pembudidaya ikan dan masyarakat	
		2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Diakutkan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	277,287,600		270,341,763	97.49	6	Unit	6	100.00						
V		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase unit usaha perikanan yang saat terhadap peraturan perundang-undangan Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	672,486,089	672,486,089	611,252,881	90.90	70	%	70	100.00						
1		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi perikanan yang terawasi	449,596,089	449,596,089	388,591,891	86.43	66	%	66	100.00						
		1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	449,596,089		388,591,891	86.43	3	Dokumen	3	100.00						

NO	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per tahun		Realisasi Capaian Kinerja			FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4	%	Jumlah	Satuan	Triwulan 4	Triwulan 1	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	14
		2	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Disalurkan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	222,890,000	222,890,000	222,701,000	99.92	80	%	80.00		100.00			
		1. Sub-Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disalurkan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat disalurkan di lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	222,890,000		222,701,000	99.92	3	Dokumen	3		100.00			
VI		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka konsumsi ikan	1,356,488,940	1,356,488,940	1,296,752,965	95.60	41.50	Kg/Kapita/tahun	40.79		95.29			
1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	506,660,840	506,660,840	501,650,600	98.01	4	Izin	3		75.00	Masih rendahnya kesadaran kelompok pemasar untuk membuat izin usaha		
		1. Sub-Kegiatan Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi berdasarkan setiap usaha dan risiko	506,660,840		501,650,600	98.01	3	Dokumen	3		100.00			

No	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja Per Tahun		Realisasi Capaian Kinerja		FAKTOR PENGHAMBAT	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
						Triwulan 4		Jumlah	Satuan	Triwulan 4				
						7	8 %			9	10 %			
1	2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	5 682.677,700	6 682.677,700	7 579.665.785	8 99,52	9 7	10 Kelompok	11 7	12 100,00	13	14	14
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penguatan Penyediaan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha pengolahan perikanan yang mendapatkan pembinaan hasil perikanan terhadap penerapan persyaratan peternakan perusahaan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	273.919.850		272.257.365	99,39	13 hit Usaha		13	100,00			
		2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Hasil Perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	Jumlah unit usaha yang diberikan pembinaan hasil produksi perikanan dan kesehatan hewan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing	308.757.850		307.602.400	99,63	13 hit Usaha		13	100,00			
3		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	267.150.400	267.150.400	215.242.600	80,57	1 dokumen		1	100,00			
		1. Sub Kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diberikan insentif dan fasilitas	267.150.400		215.242.600	80,57	10 hit Usaha		10	100,00			Target telah tercapai sepenuhnya pada triwulan IV

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKJIP Tahun Sebelumnya

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

OBJEK EVALUASI : HASIL EVALUASI ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

NOMOR LHE : LAP.700/168/ITPROV-2/VI/2024

TANGGAL LHE : 19 Juni 2024

DINAS/KANTOR/BADAN/BIRO : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

No	Uraian Rekomendasi	Hasil Tindak lanjut	Kode TL			Keterangan
			SS	BS	BT	
1	Agar diselaraskan Indikator Kinerja IKU dengan Perjanjian Kinerja (PK)	Telah diselaraskan PK tahun 2025 dengan IKU yang disahkan di tahun 2025 berdasarkan Renstra Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026	√			
2	Informasi tentang perbandingan realisasi capaian kinerja PD / Pemda dengan data realisasi capaian Nasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja	Telah dimuat perbandingan realisasi capaian kinerja DKP dengan data realisasi capaian Nasional di dalam LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	√			
3	LKJ belum memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Target kinerja belum mencapai 100% sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen- Informasi tentang perbandingan realisasi capaian kinerja PD / Pemda dengan data realisasi capaian Nasional	Masih dalam proses konsultasi tentang bagaimana memuat informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai baik secara implisit maupun eksplisit terkait kedua hal yang direkomendasikan pada Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2023		√		

Lampiran 5. Penghargaan yang Pernah Diterima



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



JL. MT HARYONO NO.09 TELANAIPURA-JAMBI